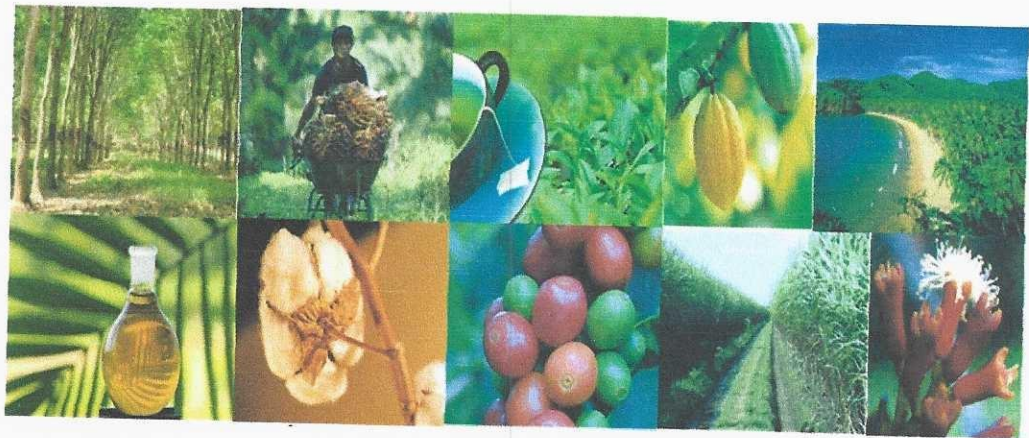




EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
Jl. Basuki Rachmat No. 8A Telp. 487865, 487866 Fax. 487865
BANDAR LAMPUNG 35229

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan **EVALUASI RENCANA AKSI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022** ini dapat diselesaikan.

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sekaligus dalam rangka terwujudnya aparatur yang bersih, bertanggungjawab dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan bahan-bahan mulai dari tahap perencanaan sampai selesainya penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Januari 2023

PIR. KEPALA DINAS

Ir. YULIASTUTI, MTA
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19670711 199203 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
BAB II GAMBARAN ORGANISASI	5
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
B. Sumber Daya	8
C. Anggaran	8
D. Sarana Pendukung	9
BAB III RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2018	11
A. Visi dan Misi	11
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	13
C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	13
D. Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022	14
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub sektor Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait perkebunan. Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, antara lain dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Oleh karenanya pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting subsektor perkebunan sebagai penyedia devisa, penyedia lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, mendukung pengembangan wilayah serta peran pentingnya dalam mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.

Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Lampung **“Rakyat Lampung Berjaya”** yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam 6 (enam) Misi, dimana bidang perkebunan masuk pada misi kelima yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung yang memiliki tugas dan fungsi memiliki kewajiban dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan setiap tahun anggaran. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
 16. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 525/093.A/SK/V.22/A.3/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah merupakan sebagai tindak lanjut hasil Rencana Aksi yang telah dilaksanakan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang merupakan perwujudan

pertanggungjawaban Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan hasil dari penjabaran rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan dalam rangka evaluasi dari penyusunan pembinaan dan petunjuk teknis bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, dan pendayagunaan kinerja aparatur pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Tujuan penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai implementasi tindak lanjut hasil dari rencana kerja yang telah dilaksanakan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2022.
2. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker Dinas Perkebunan sebagai salah satu unsur pelaksana di bidang perkebunan pemerintah Provinsi Lampung.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah penjabaran hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan dalam rencana kerja atau kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2022.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI

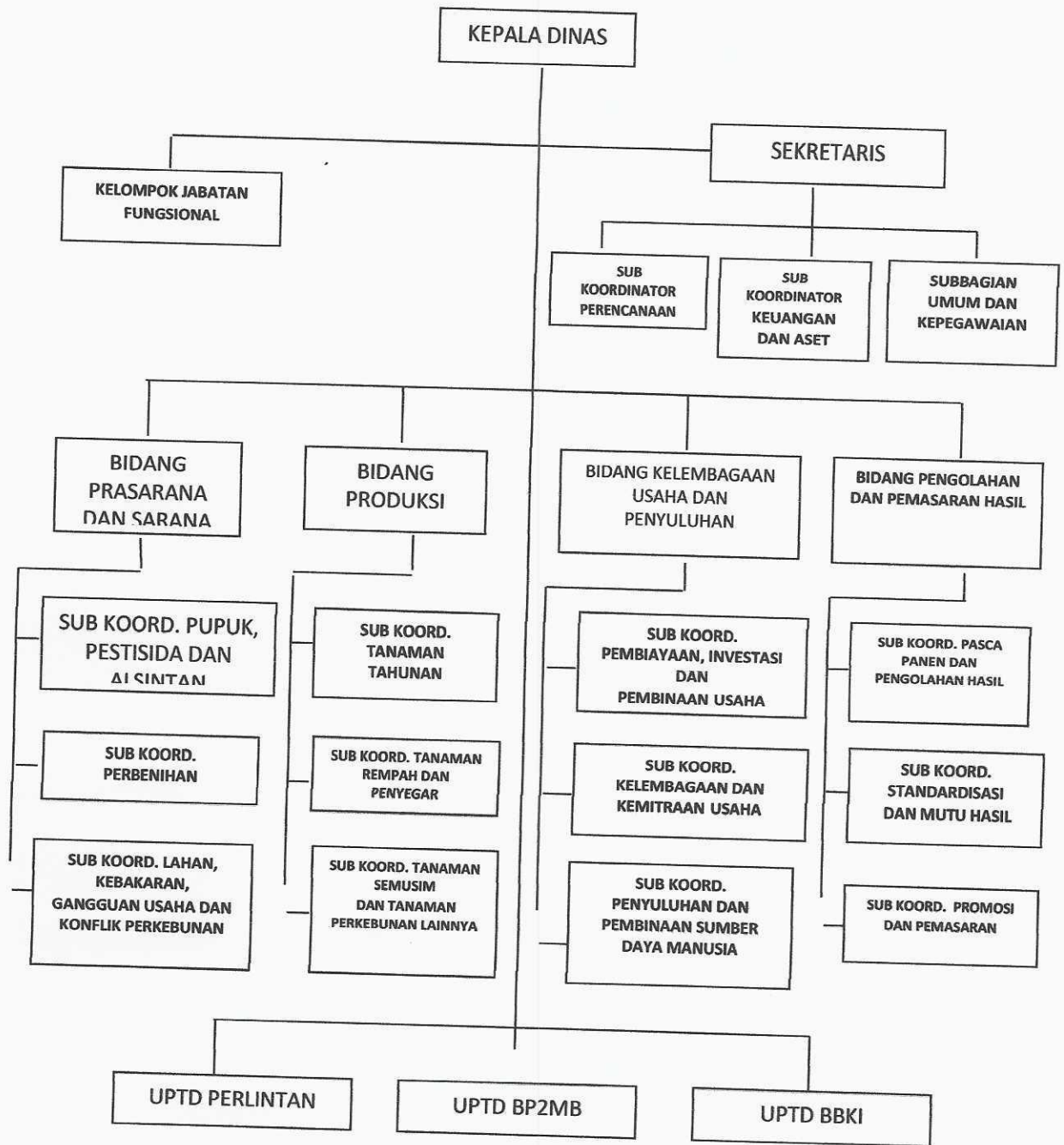
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Perkebunan. Dinas perkebunan provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang perkebunan. Dinas perkebunan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar operasional bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d. Pengawasan sarana perkebunan;
- e. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil perkebunan;
- h. Pemberian ijin usaha/ rekomendasi teknis dalam bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang perkebunan;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana perkebunan;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Terdiri Dari:

1. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator Keuangan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan
2. Bidang Produksi;
 - a. Sub Koordinator Tanaman Tahunan
 - b. Sub Koordinator Tanaman Rempah dan Penyegar
 - c. Sub Koordinator Tanaman Semusim dan Tanaman Perkebunan Lainnya
3. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - a. Sub Koordinator Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha
 - b. Sub Koordinator Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
 - c. Sub Koordinator Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
4. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - a. Sub Koordinator Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan
 - b. Sub Koordinator Perbenihan
 - c. Sub Koordinator Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - a. Sub Koordinator Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
 - b. Sub Koordinator Standarisasi dan Mutu Hasil
 - c. Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

B. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

JML PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNG.
PNS : 107	S3 : -	IV/d : -	Es.II : -	POPT : 5
PTHL : 15	S2 : 29	IV/c : -	Es.III : 8	PBT : 10
	S1 : 43	IV/b : 9	Es IV : 10	PMHP : 11
	D4 : -	IV/a : 10	Pelaksana : 89	APHP : 4
	D3 : 8	III/d : 28		APSP : 2
	D2 : -	III/c : 7		PAMP : 1
	D1 : -	III/b : 11		Perencana : 1
	SLTA : 26	III/a : 22		Penyuluh : 6
	SLTP : 1	II/d : 11		
	SD : -	II/c : 5		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		

C. Anggaran

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Alokasi Anggaran APBD & APBN untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2022

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.374.414.561,95	APBD
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	350.000.000,00	APBD
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.162.794.000,00	APBD
Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000,00	APBD
Program Penyuluhan Pertanian	4.595.835.250,00	APBD
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	250.000.000,00	APBD
Jumlah APBD	29.983.043.811,95	APBD

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Dekonsentrasi Ditjenbun)	1.083.398.000,00	APBN
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Tugas Pembantuan Ditjenbun)	6.439.144.000,00	APBN
Jumlah APBN	7.522.542.000,00	APBN
TOTAL APBD + APBN	37.505.585.811,95	

D. Sarana Pendukung

Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022 adalah :

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Mobil pick up	1 unit		√	
2	Air conditioner (AC)	18 unit	√		
3	Kipas Angin	5 unit			
4	Tabung pemadam kebakaran	8 unit			√
5	Mesin tik	6 unit		√	
6	Almari perpustakaan	4 unit		√	
7	Almari buku/rak	6 unit		√	
8	Meja rapat panjang	25 buah		√	
9	Meja tulis pimpinan	12 buah	√		
10	Zice/meja tamu	4 set	√		
11	Kursi Rapat	70 buah		√	
12	Kursi Putar	12 buah	√		
13	Kursi Biasa	30 buah		√	
14	Kursi lipat	25 buah		√	
15	Rak buku/lemari gantung	4 buah		√	
16	Filling cabinet	15 buah		√	
17	Brankas	6 buah		√	
18	Sound system	4 unit		√	
19	Mesin potong rumput	2 unit		√	
20	Bor tangan/mesin bor	1 unit		√	
21	Gorden vertical	240 m ²		√	√
22	Pagar kantor UPTD BPTP	3 paket		√	
23	Teralis jendela	120 m ²		√	
24	Pintu dorong alumunium	4 unit		√	
25	Televisi	2 unit	√		

26	Tapis Prabu	4 unit		√	
27	Figur tiang/tapis dinding	4 paket	√		
28	Handycam	2 unit	√		
29	Kamera digital	2 unit	√		
30	Printer + flash disc	12 unit		√	
31	Stabilizer	3 unit		√	
32	Penyedot debu	1 unit	√		
33	Kanopi kantor	28 m ²	√		
34	Sumur bor	1 unit	√		
35	Pompa air	1 unit	√		
36	Rumah pembibitan	1 unit	√		
37	Tangki air	2 unit	√		
38	Power sprayer	8 unit	√		
39	Telepon central	1 unit			
40	Telepon	1 unit			√
41	UPS dan stabilizer	1 unit			√
42	Meja Kerja	40 unit	√		√
43	Brankas	6 unit		√	
44	Mesin Tik	6 unit		√	
45	Laptop	12 unit	√		
46	Printer	12 unit		√	
47	Komputer	24 unit		√	
48	Scanner	24 unit		√	
49	Gapura Kantor	1 unit		√	
50	Genset	1 unit		√	
51.	Kantin	1 Unit		√	

Sumber : Sub Koordinator Keuangan dan Aset, 2022

BAB III

EVALUASI RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2022

A. Visi dan Misi

Pada periode Renstra Tahun 2019-2024 tidak ada lagi Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tetapi mengikuti visi Gubernur Provinsi Lampung yaitu **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

➤ Kehidupan masyarakat yang aman

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

➤ Kehidupan masyarakat yang berbudaya

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (*inovatif*) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

➤ Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

➤ Kehidupan yang sejahtera

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Pada periode Renstra 2019 – 2024 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 6 (enam) misi yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sektor Perkebunan Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung yaitu:

Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka usaha mewujudkan Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, maka dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Misi 5 RPJMD dengan Sasaran 2 yaitu Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung, maka Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menetapkan Tujuan dalam periode 2019-2024 adalah “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan” dengan Sasaran Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan.

INDIKATOR TUJUAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	% KENAIKAN TAHUN 2022
1.	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	-0,4

C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut misi kelima yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan	834.990	Ton
	a. Lada	15.464	Ton
	b. Kopi Robusta	117.780	Ton
	c. Tebu	189.606	Ton
	d. Karet	164.706	Ton
	e. Kakao	61.250	Ton
	f. Kelapa Sawit	199.959	Ton
	g. Kelapa Dalam	86.225	Ton

D. Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022

Adapun Program Prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Program Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 16.374.414.561,95,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.508.760.352,92 terdiri atas kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 194.832.999,92,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.832.000,00,- terdiri atas sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 129.558.000,- dan realisasi sebesar Rp. 129.558.000,-

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 65.274.999,92,- dengan realisasi Rp. 65.274.800,00,-
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.816.985.057,03,- dan realisasi Rp. 12.486.001.236,- terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 12.794.065.057,03 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.465.408.236,00,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD pagu anggaran Rp. 22.920.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.593.000,00,-
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 109.237.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 95.728.800,00,- terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pemindehan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 36.320.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.819.800,00,-
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran Rp. 72.917.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 68.909.000,00,-
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 961.515.000,00,- dengan realisasi anggaran 767.090.288,00,- dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 22.015.500,00,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 75.000.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.933.900,00,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 34.800.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.950.000,00,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material dengan anggaran sebesar Rp. 173.322.300,00,- dan realisasi anggaran Rp. 125.622.523,00,-
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,- dan realisasi anggaran Rp. 35.537.000,00,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 578.392.700,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 526.031.365,00,-
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.489.052.505,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.200.265.247,00,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 410.000.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 197.991.462,00,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 493.402.505,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 475.476.685,00,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 585.650.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 526.797.100,00,-
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 802.792.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 764.841.982,00,- dengan perincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp. 333.342.000,00,- dengan realisasi Rp. 332.625.179,00,-
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 50.000.000,00,- dengan realisasi Rp. 29.180.000,00,-

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 373.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 369.319.000,00,-
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp.46.380.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.717.803,00,-
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran Rp. 350.000.000,00,- dan realisasi anggaran Rp. 319.385.500,00,- dengan perincian kegiatan sebagai berikut :
- b. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.513.000,00,- dengan sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan sarana pendukung pertanian dengan anggaran Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.513.000,00,-
 - c. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 250.872.500,00,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pengelolaan penerbitan sertifikat benih dengan anggaran Rp. 100.000.000,00,- dan realisasi anggaran Rp. 99.998.500,00,-
 - Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan dengan anggaran Rp. 175.000.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 150.874.000,00,-
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 8.162.794.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.495.826.414,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 8.162.794.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.495.826.414,00,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 7.532.864.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.889.319.010,00,-
 - Sub Kegiatan Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 379.930.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 361.618.404,00,-
 - Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 244.889.000,00,-
- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan anggaran Rp. 250.000.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.721.350,00,- dengan rincian Kegiatan:
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.721.350,00,- dengan sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.721.350,00,-
- 5) Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp. 4.595.835.250,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.432.790.800,00,- dengan rincian kegiatan :
- a. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 4.245.835.250,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.093.159.800,00,- dengan rician sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 4.245.835.250,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.093.159.800,00,-
 - b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 339.631.000,00,- dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 339.631.000,00,-
- 6) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 245.435.000,00,- dengan rincian kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,- dengan rincian sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 200.000.000,00
 - Sub Kegiatan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.435.000,00,-.

B. Program Kegiatan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Dekonsentrasi Ditjenbun) dengan anggaran sebesar Rp. 248.100.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 247.800.000,00,- terdiri dari kegiatan :
 - a. Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 248.100.000,00,- dengan realisasi kegiatan Rp. 247.800.000,00,-
2. Program Dukungan Manajemen (Dekonsentrasi Ditjenbun) dengan anggaran sebesar Rp. 835.298.000,00,- dengan realisasi kegiatan Rp. 816.735.250,00,- terdiri dari kegiatan :
 - a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 835.298.000,00,- dengan realisasi kegiatan Rp. 816.735.250,00,-

3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Tugas Pembantuan Ditjenbun) dengan anggaran sebesar Rp. 5.518.408.000,00,- dengan realisasi Rp. 4.091.226.460,00,- terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 3.793.155.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.529.700.850,00,-
 - b. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.287.560.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.269.804.100,00-
 - c. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 437.693.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 291.721.510,00,-
4. Program Dukungan Manajemen (Tugas Pembantuan Ditjenbun) dengan anggaran sebesar Rp. 920.736.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 822.211.500,- dengan kegiatan :
 - a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan anggaran Rp. 920.736.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 822.211.500,-

C. Matrik Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022

Matrik Evaluasi rencana aksi kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				REKONSILIASI		JADWAL PELAKSANAAN		PENANGGUNG JAWAB	
KG	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET T/W	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGI	T/W	TARGET T/W	REKONSILIASI	ANGGARAN	AKSI	T/W	JADWAL PELAKSANAAN	T/W	PENANGGUNG JAWAB	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah orang yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional (150 orang)	1	0 orang	0 orang		1	Inventaris ASN yang akan mengikuti pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional 2 Mengikuti pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional 3 Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan	V			
				Kegiatan					961.515.000							
				Administrasi Umum		Jumlah bulan layanan administrasi umum	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Penyusunan SK pelaksanaan kegiatan 2 Penyusunan Jadwal dan Juknis Kegiatan 3 Pelaksanaan layanan administrasi umum	V V V		I. JABUK, MTA	
				Sub Kegiatan :												
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga peralatan listrik (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Surat pemesanan barang 2 Surat perintah kerja 3 Belanja barang 4 Berita acara penerimaan barang	V V V			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Belanja cetak 2 Belanja pengadaan 3 Penyusunan laporan	V V V			
				Penyediaan bahan bacaan dan perantara perundang-undangan		Jumlah bulan layanan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Belanja surat kabar/ majalah, peraturan, perundang-undangan	V			
				Penyediaan bahan/ material		Jumlah bulan layanan penyediaan alat tulis kantor (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Belanja alat tulis kantor dinas dan UPTD 2 Penyusunan laporan	V V			
				Fasilitasi Kunjungan Tim		Jumlah bulan layanan penyediaan makanan dan minuman rapat (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Belanja makanan dan minuman rapat/ tamu Dinas 2 Penyusunan laporan	V V			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan layanan penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Administrasi persiapan kegiatan 2 Perencanaan dalam daerah 3 Perencanaan luar daerah 4 SPJ dan Laporan	V V			
				Kegiatan					1.489.052.505							
				Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Penyusunan SK pelaksanaan kegiatan 2 Penyusunan Jadwal dan Juknis Kegiatan 3 Pelaksanaan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	V V V		I. JABUK, MTA	
				Sub Kegiatan :												
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	3 bulan	3 bulan		1	1 Pembayaran tagihan telepon 2 Pembayaran tagihan air PAM 3 Pembayaran tagihan listrik	V V V			

SASARAN		PROGRAM					KEGIATAN					JADWAL PELAKSANAAN		
No	Sasaran Strategis	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TAR GEF /W	REALISASI	REKAMATAH SUB REKAMATAH	INDIKATOR DEG	TW	TARGET/W	REALISASI	ANGGARAN	AKSI	1	PERANGKAT JAWAB
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyusunan laporan		
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan pengeluaran aset (1 dokumen)	1	0 dokumen	0 dokumen		1. Penyusunan TOR 2. Koordinasi dengan Kab/ Kota 3. Inventarisasi kebutuhan barang dan pengeluaran aset 4. Penyusunan laporan kegiatan	V V	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1	3 bulan	3 bulan	802.792.000	1. Penyusunan SK pelaksanaan dan TOR kegiatan 2. Belanja pemeliharaan gedung dan peralatan gedung kantor 3. Belanja perawatan kendaraan	V V	Ir. JABUK, MTA
						Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1. Belanja Restitusi pajak PBB kendaraan roda 4 dan roda 2 2. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	V V	
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa dan perbaikan peralatan lainnya (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan/ peralatan dan mesin kantor 2. Penyusunan laporan	V	
						Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor Dinas dan bangunan UPTD 2. Penyusunan laporan	V	
						Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan layanan Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (12 bulan)	1	3 bulan	3 bulan		1. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 2. Penyusunan laporan	V	
						Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pertanahan	Jumlah lokasi pengawasan perencanaan sarana pertanahan (15 Kab/ kota)	1	0 kab/ kota	0 kab/ kota	75.000.000	1. Penyusunan TOR 2. Pengawasan perencanaan sarana pertanahan ke Kab/ Kota 3. Penyusunan laporan kegiatan	V	Ir. REVI AKMAL YUDHA PUTRA MTA
						Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Penguatangan Sarana Pertanahan	Persentase Penyediaan Berib Bermutu dan Sarana Pertanahan (5%)	1	0	0				

MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022

No	SASARAN		PROGRAM					KEGIATAN					AKSI		PEMANGGUNG JAWAB				
	Sasaran Strategis	Indikator Utama	TW	SAJUNTA/REDAK/STIS	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI		REVISI	REVISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	2			Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah Lampung (100%)	Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah Lampung (100%)	2	50	50	Kegiatan Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah Lampung (16 dokumen)	Jumlah dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (16 dokumen)	2	4 dokumen	4 dokumen	194.837.999,92	1. Koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan Kab/ Kota 2. Pelaksanaan musrenbang Perkebunan 3. Penyusunan dokumen perencanaan	V	Ir. JABUK, MTA
						Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2			Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja (6 dokumen)	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (6 dokumen)	2	2 dokumen	2 dokumen		1. Koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan Kab/ Kota 2. Penyusunan dokumen perencanaan	V	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2			Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja (10 dokumen)	Jumlah penyusunan laporan dan evaluasi kinerja (10 dokumen)	2	3 dokumen	3 dokumen		1. Koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan Kab/ Kota 2. Menghimpun materi/realisasi keuangan dan kinerja dari pelaksanaan kegiatan 3. Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja	V	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2			Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (12 bulan)	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	12.816.985.037,03	1. Pembinaan SK 2. Pembinaan honoraria pemertiga barang dan jasa 3. Pembinaan honoraria operator 4. Pembinaan honoraria pengelola keuangan SKPD 5. Pembinaan honoraria PPTK 6. Penyusunan laporan	V	Ir. JABUK, MTA
						Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (12 bulan)	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (12 bulan)	2			Jumlah bulan pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2	3 bulan	3 bulan		1. Penetapan SK Bendahara Gaji 2. Pembinaan gaji dan tunjangan ASN	V	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2			Jumlah bulan pelayanan laporan capaian keuangan (12 bulan)	Jumlah bulan pelayanan laporan capaian keuangan (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan		1. Menghimpun realisasi keuangan sebagai bahan Laporan Capaian Keuangan dari pelaksanaan kegiatan 2. Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran dan tahunan	V	
						Sub Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2			Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (12 bulan)	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	109.237.000	1. Inventarisir ASN yang masuk purna bhakti/ naik pangkat/ kenaikan gaji berkala 2. Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan	V	Ir. JABUK, MTA
						Sub Kegiatan : Pemindahan Tugas ASN	Sub Kegiatan : Pemindahan Tugas ASN	2			Jumlah dokumen pengembangan budaya kerja disiplin aparaturnya (5 dokumen)	Jumlah dokumen pengembangan budaya kerja disiplin aparaturnya (5 dokumen)	2	1 dokumen	1 dokumen		1. Penyusunan dokumen pengembangan budaya kerja aparaturnya 2. Penyusunan dokumen disiplin aparaturnya 3. Penyusunan Laporan	V	

PC	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN	PENGANGGUNG JAWAB	
	Indikator Kinerja	TARGET/ TV	REALISASI/ TV	INDUKTOR	REVISI/ TV	REVISI/ TV	INDUKTOR KEE	TARGET/ TV	REVISI/ TV				AKSI
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.			Jumlah orang yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional (150 orang)	2	0 orang	0 orang	1. Inventarisasi ASN yang akan mengikuti pengembangan jabatan fungsional 2. Mengikuti pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional 3. Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan	V V V	Ir. JABUK, MTA
				Kegiatan Administrasi Umum			Jumlah bulan layanan administrasi umum	2	3 bulan	3 bulan	961.515.000 1. Penyusunan SK pelaksanaan kegiatan 2. Penyusunan Jadwal dan Juknis Kegiatan 3. Pelaksanaan layanan administrasi umum	V V V	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Perlatan Rumah Tangga			Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga peralatan listrik (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	1. Surat pemesanan barang 2. Surat perintah kerja 3. Belanja barang 4. Berita acara penerimaan barang	V V V V	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetak dan penggandaan (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	1. Belanja cetak 2. Belanja pengadaan 3. Penyusunan laporan	V V V	
				Penyediaan bahan bahan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah bulan layanan penyediaan bahan, bahan dan peraturan perundang-undangan (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	1. Belanja surat kabar/ majalah, peraturan perundang-undangan	V	
				Penyediaan bahan/ material			Jumlah bulan layanan penyediaan alat tulis kantor (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	1. Belanja alat tulis kantor dinas dan UPTD 2. Penyusunan laporan	V V	
				Facilities Kurjungan Temu			Jumlah bulan layanan penyediaan makanan dan minuman rapat (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	1. Belanja makanan dan minuman rapat/ tamu Dinas 2. Penyusunan laporan	V V	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, SKPD			Jumlah bulan layanan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	1. Administrasi persiapan 2. Perencanaan dalam daerah 3. Pelaksanaan luar daerah 4. SRJ dan Pelaporan	V V V V	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah			Jumlah bulan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan	1. Penyusunan SK pelaksanaan kegiatan 2. Penyusunan Jadwal dan Juknis Kegiatan 3. Pelaksanaan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	V V	Ir. JABUK, MTA
				Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber			Jumlah bulan layanan penyediaan	2	3 bulan	3 bulan	1. Pembelian tagihan telepon 2. Pembelian tagihan air PAM	V V	

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	PEMANGGUNG JAWAB						
Ko	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	RENYA/ SAST	PROGRAM	INDIKATOR	TW	SPK/ TW	REAP/ 451	MEGHASIL/ SUB/ KEGIATAN	INDIKATOR/ REC	TW	TARGET/ TW		REALISASI	APRIBANAN	AKSI/ KEGIATAN	TI		
							Pengawasan sebaran pupuk pestisida alatiran dan sarana pendukung pertanian					Jumlah lokasi pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida (15 kab/ kota)	2	0 kab/ kota	0 kab/ kota		1. Penyusunan TOR 2. Pengawasan peredaran pupuk ke Kab/ Kota 3. Penyusunan laporan kegiatan	V			
							Kegiatan Pengawasan Mutu dan Penyediaan Sumbat Benih/ Bibit Perkebunan					Jumlah lokasi pengawasan mutu dan penyediaan sumber benih/ bibit perkebunan (15 kab/ kota)	2	0 kab/ kota	0 kab/ kota	2/5.000.000	1. Penyusunan TOR/ juklak/ juknis 2. Koordinasi dengan Kab/ Kota 3. Inventarisasi, identifikasi, pengawasan mutu benih dan sertifikasi mutu benih 5. Penyusunan laporan kegiatan	V		I. BEVI AKMAL YUDHA PUTRA MTA	
							Sub Kegiatan : Penggulaan Persebaran Sertifikat Benih					Jumlah sertifikat mutu benih tanaman yang diterbitkan (60 sertifikat)	2	15 sertifikat	15 sertifikat		1. Penyusunan TOR/ juklak/ juknis 2. Koordinasi dengan Kab/ Kota 3. Inventarisasi, identifikasi, pengawasan mutu benih dan sertifikasi mutu benih 4. Penyusunan laporan kegiatan	V			
							Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan					Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan (15 kab/ kota)	2	0 kab/ kota	0 kab/ kota		1. Penyusunan TOR/ juklak/ juknis 2. Koordinasi dengan Kab/ Kota 3. Inventarisasi, identifikasi, pengawasan mutu benih dan sertifikasi mutu benih 4. Penyusunan laporan kegiatan	V			
							Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian					Persentase Peningkatan Penanaman Prasarana (3%)	2	0	0	8.162.794.000	1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi Provinsi dan Kab/ Kota 4. Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CI) 4. Pengadaan (Kontrak) Penyerahan alat (bantuan) kepada petani penerima manfaat 6. Penyusunan Laporan	V			
							Sub Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawas dan Komoditas Pertanian					Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan (663 unit)	2	0 unit	0 unit		1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi Provinsi dan Kab/ Kota 4. Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CI) 4. Pengadaan (Kontrak) Penyerahan alat (bantuan) kepada petani penerima manfaat 6. Penyusunan Laporan	V			
							Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin					Jumlah kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin	2	0 kegiatan	0 kegiatan		1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan	V			

ELENA RUSDI, ST.
MTA

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	PEMERINTAH DAERAH	
Ko	Sasaran Strategis	TW	TW	INDIKATOR	TW	REALISASI	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/ RAG	TW	TARBIYAT	REKONSILI	ANGGARAN	AKSI/KEGIATAN		0
							Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya	peneliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya (1 kegiatan)					1. Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya 2. Penyusunan Laporan		
							Peningkatan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah bulan pemeliharaan laboratorium mutu benih UPTD BP2MB (12 bulan)	2	3 bulan	3 bulan		1. Pemeliharaan laboratorium mutu benih UPTD BP2MB	V	
							Kegiatan					250.000.000	1. Penyusunan SK kegiatan. 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi Provinsi dan kab/ Kota 4. Penilaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kab./ Kota (15 PBN/ PBS)	V V	I. YULIASTUTI, MTA
							Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Kegiatan Penilaian Usaha Pekebunan (1 Kegiatan)	2	0 kegiatan	0 kegiatan		1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi Provinsi dan kab/ Kota 4. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 5. Penyusunan Laporan	V V	
							Kegiatan					4.595.835.250	1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi Provinsi dan kab/ Kota 4. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian 5. Penyusunan Laporan	V V	I. YULIASTUTI, MTA
							Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Lokasi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (15 kab/ Kota)	2	0 kab/ kota	0 kab/ kota		1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi Provinsi dan kab/ Kota 4. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian 5. Penyusunan Laporan	V V	
							Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah lokasi sosialisasi dan pendataan pekebun pendukung Kartu Petani Berjaya (KPB) (7 kab/ Kota)	2	0 kab/ kota	0 kab/ kota		1. Koordinasi dengan kab/ Kota 2. Peretapan calon petani/ calon lokasi (CP/CL) 3. Perencanaan sosialisasi inventarisasi dan pendataan pekebun pendukung kartu petani berjaya 4. Penyusunan laporan	V V	
							Kegiatan					350.000.000	1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi Provinsi dan kab/ Kota 4. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan (4 Kelompok Tani)	V V	I. YULIASTUTI, MTA

SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	PEMANGGUNG JAWAB		
Indikator Kinerja	Target /TW	Realisasi /TW	TAR GET /TW	REALISASI	INDIKATOR	REAG/MS/KB/KP/KA/AR	INDIKATOR REG	TV	TAR GET /TW	REALISASI	ANGGARAN				
						Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelenbagan Korporasi Petani	Jumlah penerima manfaat pengembangan dan penguatan kelenbagan petani, kelompok petani dan pemberdayaan petani pekebun (10 kelompok tani)	2	0 kelompok tani	0 kelompok tani			1 Koordinasi dengan Kab/ Kota 2 Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CI) 3 pengembangan dan penguatan kelenbagan petani, kelompok dan pemberdayaan petani pekebun 4 Penyusunan laporan	V	
				0	Pengendalian dan Penunjang an Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian dan Penguatan Kelenbagan Korporasi Petani	Jumlah Luasan Pengendalian dan Penunjang an Bencana Perkebunan (150 hektar)	2	0 hektar	0 hektar	250.000.000		1 Koordinasi dengan Kab/ Kota 2 Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CI) 3 Penguatan dan Penunjang an Bencana Perkebunan 4 Penyusunan laporan	V	I. AKHMAD RIZAL
					Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (50 hektar)	2	0 hektar	0 hektar			1 Koordinasi dengan Kab/ Kota 2 Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CI) 3 Pelaksanaan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan 4 Penyusunan laporan	V	
					Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pencegahan dan penguatan kelenbagan lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan (1 kasus)	Jumlah kasus pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan (1 kasus)	2	0 kasus	0 kasus			1 Penyusunan SK kegiatan 2 Penyusunan TOR 3 Pelaksanaan pertemuan pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan 4 Penyusunan laporan	V	

MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI DINAS PERKEBUKAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022

No	SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN				AKSI			REMBANGUNG JAWAB			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Program	Indikator	TV	Har Get /TW	Pras AS	Kegiatan	Indikator HES	TV	Berkas/TW	Realisasi		Anggaran	Aksi Regulator	H
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	23
				Penunjang	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (100%)	3	75	75	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (15 dokumen)	3	3	4 dokumen	1 dokumen	194.832.999,92	1. Koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan Kab/ Kota 2. Pelaksanaan musrenbang Perkebunan 3. Penyusunan dokumen perencanaan	V	Ir. JABUK, MTA
									Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (6 dokumen)	3	1 dokumen	1 dokumen		1. Koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan Kab/ Kota 2. Penyusunan dokumen perencanaan	V	
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan dan evaluasi kinerja (10 dokumen)	3	2 dokumen	2 dokumen		1. Koordinasi dengan bidang terkait, koordinasi dengan Kab/ Kota 2. Menghimpun materi/ realisasi kegiatan dan kinerja dari pelaksanaan kegiatan 3. Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja	V	
									Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan	12.816.985.057,03	1. Pembinaan SK 2. Pembinaan honor tim peneriksa barang dan jasa operator 3. Pembinaan honor tenaga operator 4. Pembinaan honor pengelola keuangan SKPD 5. Pembinaan honor PPTK 6. Penyusunan laporan	V	Ir. JABUK, MTA
									Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3	3 bulan	3 bulan		1. Penetapan SK Bendahara Gaji 2. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	V	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah bulan penyusunan laporan capaian Kelengkapan (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan		1. Menghimpun realisasi keuangan sebagai bahan Laporan Capaian Keuangan dari pelaksanaan kegiatan 2. Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran dan tahunan	V	
									Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan	109.237.000	1. Inventaris ASN yang memasuki purna bhakti/ naik pangkat/ kenaikan gaji berkala 2. Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan	V	Ir. JABUK, MTA
									Sub Kegiatan : Pemindahan Tugas ASN	Jumlah dokumen pengembangan budaya kerja ASN	3	1 dokumen	1 dokumen		1. Penyusunan dokumen pengembangan budaya kerja 2. Penyusunan dokumen disiplin	V	

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN		PEMBANGGUNG JAWAB		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET TW	TARGET TRW	INDIKATOR FW	INDIKATOR SUB KEGIATAN	INDIKATOR KGF	TW	TARGET/TW	KEHATI-HASAN	ALOKASI	AKSI	AKSI	AKSI	AKSI		AKSI	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional (150 orang)	3	0 orang	0 orang		3	1. Invenstrasi ASN yang akan mengikuti pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional 2. Mengikuti pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional 3. Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan	V				
						Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah bulan layanan administrasi umum	3	3 bulan	3 bulan	961.515.000	1. Penyusunan SK pelaksanaan kegiatan 2. Penyusunan Jadwal dan Jadwal Kegiatan 3. Pelaksanaan layanan administrasi umum	V					Ir. JABUK, MTA
						Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga peralatan listrik (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan		1. Surat pemesanan barang 2. Surat perintah kerja 3. Belanja barang 4. Berita acara pencairan barang	V					
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan		1. Belanja cetak 2. Belanja penggandaan 3. Penyusunan laporan	V					
						Penyediaan bahan bacaan dan persuratan perundang-undangan	Jumlah bulan layanan penyediaan bahan bacaan dan persuratan perundang-undangan (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan		1. Belanja surat kabar/ majalah, peraturan perundang-undangan	V					
						Penyediaan bahan/ material	Jumlah bulan layanan penyediaan alat tulis kantor (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan		1. Belanja alat tulis kantor dinas dan UPTD 2. Penyusunan laporan	V					
						Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan layanan penyediaan makanan dan minuman rapat (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan		1. Belanja makanan dan minuman rapat/ tamu. Dinas 2. Penyusunan laporan	V					
						Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan layanan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan		1. Administrasi persiapan 2. Perencanaan dalam daerah 3. Perencanaan luar daerah 4. SPJ dan belaporan	V					
						Kegiatan Penyiapan Jasa Pemertintahan Daerah	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemertintahan daerah (12 bulan)	3	3 bulan	3 bulan	1.489.052.505	1. Penyusunan SK pelaksanaan kegiatan 2. Penyusunan Jadwal dan Jadwal Kegiatan 3. Pelaksanaan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemertintahan	V					Ir. JABUK, MTA
						Sub Kegiatan : Penyediaan jasa	Jumlah bulan	3	3 bulan	3 bulan		1. Pembinaan/ tuisuhan tahun	V					

SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN		PEMANGGUNG JAWAB	
Kc	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	DAE/ GEF/ ITW	REALIS/ ASF	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR REG	TW	TARGET/ TW	REALISASI	ANGKARAN	AKSI KEGIATAN		TH
							<p>Sub Kegiatan : Pengawasan sebaran pupuk pestisida alantun dan sarana pendukung pertanian (15 kab/ kota)</p> <p>Kegiatan Pengawasan Mutu dan Penyediaan Sumber Benih/ Bibit Perkebunan</p>	Jumlah lokasi pengawasan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida (15 kab/ kota)	3	0 kab/ kota	0 kab/ kota		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan TOR 2. Pengawasan peredaran pupuk ke kab/ kota 3. Penyusunan laporan kegiatan 	V	Ic. EBY AKMAL YUDHA PUTRA MTA
							<p>Sub Kegiatan : Pengelolaan Penuhitan Sertifikat Benih</p>	Jumlah lokasi pengawasan mutu dan penyediaan sumber benih/ bibit perkebunan (15 kab/ kota)	3	0 kab/ kota	0 kab/ kota	275.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan TOR/ juklak/ juknis 2. Koordinasi dengan Kab./ Kota 3. Inventarisasi, identifikasi, pengawasaan mutu benih dan sertifikasi mutu benih 5. Penyusunan laporan kegiatan 	V	
							<p>Sub Kegiatan : Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan</p>	Jumlah sertifikat mutu benih tanaman yang diterbitkan (60 sertifikat)	3	15 sertifikat	15 sertifikat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan TOR/ juklak/ juknis 2. Koordinasi dengan Kab./ Kota 3. Inventarisasi, identifikasi, pengawasaan mutu benih dan sertifikasi mutu benih 4. Penyusunan laporan kegiatan 	V	ELFINA RUSDI, ST. MTA
							<p>Kegiatan Peningkatan Perencanaan</p>	Presentase Peningkatan Peningkatan Peningkatan Perencanaan	3	0	0	8.162.794.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi 4. Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CL) 5. Penyusunan alat (bananas) kepada petani penerima manfaat 6. Penyusunan Laporan 	V	
							<p>Sub Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian</p>	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan (663 unit)	3	0 unit	0 unit		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi 4. Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CL) 5. Penyusunan alat (bananas) kepada petani penerima manfaat 6. Penyusunan Laporan 	V	
							Pembangunan	Jumlah kegiatan	3	0 kegiatan	0 kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SK kegiatan 		

MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI DINAS PERKEBUKAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022

No	SASARAN			PROGRAM							KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	PERANGKAS/ASAS JAWAB
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator	Program	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Melestarikan Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)	834.990	4	844.521	7	8	9	100	100	Kegiatan : Perencanaan, dan Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (15 dokumen)	4	4	4	4	194.832.999,92	1	Ir. JABUK, MTA
											Sub Kegiatan : Perencanaan dokumen perencanaan perangkat daerah	4	2	2	2		1	
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	3	3	3		2	
											Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	3	3	3	12.816.985.057,93	1	Ir. JABUK, MTA
											Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4	3	3	3		2	
											Kondikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4	3	3	3		3	
											Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	3	3	3	109.237.000	1	Ir. JABUK, MTA
											Sub Kegiatan : Pendidikan Tugas ASN	4	2	2	2		2	

SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN				AKSI			JADWAL PELAKSANAAN	PERANGKAT
No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Sub Kegiatan	Indikator KEGIATAN	Target / TW	Realisasi / TW	Anggaran	Aksi Kegiatan	IV	Perangkat		
						(5 dokumen)								
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pengembangan kompetensi aparaturnya dan Jabatan Fungsional (150 orang)	4	150 orang		3 Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan	V			
					Kegiatan				961.515.000					
					Administrasi Umum	Jumlah bulan layanan administrasi umum	4	3 bulan		1 Penyusunan SK pelaksanaan kegiatan 2 Penyusunan Jadwal dan Juknis Kegiatan 3 Pelaksanaan layanan administrasi umum	V		It. JABUK, MTA	
					Sub Kegiatan : Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah bulan layanan penyediaan peralatan rumah tangga peralatan listrik (12 bulan)	4	3 bulan		1 Surat pemesanan barang 2 Surat perintah kerja 3 Belanja barang 4 Berita acara penerimaan barang	V			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 bulan)	4	3 bulan		1 Belanja cetak 2 Belanja pengesandaan 3 Penyusunan laporan	V			
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 bulan)	4	3 bulan		1 Belanja surat kabar/ majalah, peraturan perundang-undangan	V			
					Penyediaan bahan/ material	Jumlah bulan layanan penyediaan alat tulis kantor (12 bulan)	4	3 bulan		1 Belanja alat tulis kantor dinas dan UPTD 2 Penyusunan laporan	V			
					Facilities Kunjungan/ Tama	Jumlah bulan layanan penyediaan makanan dan minuman rapat (12 bulan)	4	3 bulan		1 Belanja makanan dan minuman rapat/ tamu Dinas 2 Penyusunan laporan	V			
					Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan layanan penyediaan rapat rapat c koordinasi dan konsultasi (12 bulan)	4	3 bulan		1 Administrasi persiapan 2 Perijinan dalam daerah 3 Perijinan luar daerah 4 SPJ dan Pelaporan	V			
					Kegiatan				1.489.052.505					
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (12 bulan)	4	3 bulan		1 Penyusunan SK pelaksanaan kegiatan 2 Penyusunan Jadwal dan Juknis Kegiatan 3 Pelaksanaan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	V		It. JABUK, MTA	
					Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah bulan layanan penyediaan	4	3 bulan		1 Pembawahan tagihan telepon 2 Pembawahan tagihan air PAM	V			

SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN				AKSI			PEWANGSUNG
Indikator Kinerja	TARGET/ TW	INDIKATOR	TW	TAR. GET. /TW	REVISI KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	REVISI/ASI	ANGGARAN	AKSI KEGIATAN	IV	JAWAB
					Sub Kegiatan :	Jumlah lokasi pengawasan mutu pupuk pestisida aliraman dan sarana pendukung pertanian (15 kab/ kota)	4	15 kab/ kota	15 kab/ kota		1. Penyusunan TOR 2. Pengawasan pelaksanaan pupuk ke Kab/ Kota 3. Penyusunan laporan kegiatan	V	I. REVI AKMAL YUDHA PUTRAMA
					Kegiatan	Jumlah lokasi pengawasan mutu dan penyediaan sumber benih/ bibit perkebunan (15 kab/ kota)	4	15 kab/ kota	15 kab/ kota	275.000.000	1. Penyusunan TOR/ juklak/ juknis 2. Koordinasi dengan Kab/ Kota 3. Inventarisasi, identifikasi, pengawasan mutu benih dan sertifikasi mutu benih 5. Penyusunan laporan kegiatan	V	
					Sub Kegiatan :	Jumlah sertifikat mutu benih tanaman yang diterbitkan (60 sertifikat)	4	15 sertifikat	15 sertifikat		1. Penyusunan TOR/ juklak/ juknis 2. Koordinasi dengan Kab/ Kota 3. Inventarisasi, identifikasi, pengawasan mutu benih dan sertifikasi mutu benih 4. Penyusunan laporan kegiatan	V	
					Kegiatan	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan (15 kab/ kota)	4	15 kab/ kota	15 kab/ kota	8.162.794.000	1. Penyusunan TOR/ juklak/ juknis 2. Koordinasi dengan Kab/ Kota 3. Inventarisasi, identifikasi, pengawasan mutu benih dan sertifikasi mutu benih 4. Penyusunan laporan kegiatan	V	ELIYMA RUSDI, ST. MTA
					Sub Kegiatan :	Persentase Peningkatan Penataan Prasarana Pertanian (82 unit)	4	82 unit	81 unit		1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Membuat surat koordinasi Provinsi dan Kab/ Kota 4. Penetapan calon petani/ calon lahan (CP/CL) 4. Pengadaan (kontrol) 5. Penyerahan alat (bantuan) kepada petani penerima manfaat 6. Penyusunan Laporan	V	
					Kegiatan	Jumlah kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Rutin (82 unit)	4	1 kegiatan	1 kegiatan		1. Penyusunan SK kegiatan 2. Penyusunan TOR 3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan	V	

SASARAN		PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN	PEMANGGUNG JAWAB	
Strategis	Indikator Kinerja	Indikator	Tipe GPT / JW	Realisasi	Revisi Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator KRS	TW	TARGET/TW	REKAPESK	ANGGARAN	AKSI KEGIATAN	TY	
						Sub Kegiatan :		4	10 kelompok tani	10 kelompok tani		1 Koordinasi dengan Kab/ Kota 2 Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CL) 3 pengembangan dan penguatan kelembagaan petani: gapoktan dan pemberdayaan petani 4 Penyusunan laporan	V	E. AKHMAD RIZAL
		Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Korporasi Petani				Jumlah penerima manfaat pengembangan dan penguatan kelembagaan petani, gapoktan dan pemberdayaan petani perkebun (10 kelompok tani)		4	10 kelompok tani					
		Pengendalian dan Peningkatan Perikanan dan Perikanan Perikanan	4	25	25	Jumlah Luasan Pengendalian dan Peningkatan Perikanan Perikanan (150 hektar)		4	150 hektar	150 hektar	250.000.000	1 Koordinasi dengan Kab/ Kota 2 Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CL) 3 Pengembangan dan Peningkatan Perikanan Perikanan 4 Penyusunan laporan	V	
		Pengendalian dan Peningkatan Perikanan dan Perikanan Perikanan	4	25	25	Jumlah Luasan Pengendalian dan Peningkatan Perikanan Perikanan (50 hektar)		4	50 hektar	50 hektar		1 Koordinasi dengan Kab/ Kota 2 Penetapan calon petani/ calon lokasi (CP/CL) 3 Pelaksanaan Pengendalian organisasi perikanan tumbuan (OPT) tanaman perkebunan 4 Penyusunan laporan	V	
		Pengendalian dan Peningkatan Perikanan dan Perikanan Perikanan	4	25	25	Jumlah kasus penanganan perkebunan (1 kasus)		4	1 kasus	1 kasus		1 Penyusunan SK kegiatan 2 Penyusunan TOR 3 Pelaksanaan pertemuan penguatan perikanan kekelompokan lahan dan gangguan usaha tanaman perkebunan (1 kasus) 4 Penyusunan laporan	V	

BAB IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan gambaran hasil pelaksanaan rencana aksi yang dapat pula menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun selanjutnya. Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi yang merupakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian penutup dari Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 diharapkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022 agar dapat dicapai sepenuhnya oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Dalam rangka meningkatkan kinerja di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam upaya mencapai sasaran target antara lain adalah :

1. Meningkatkan koordinasi antara lintas sektor dan lintas program termasuk dengan Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan advokasi kepada legislatif, eksekutif maupun stakeholder lainnya dalam hal anggaran dan program bidang perkebunan khususnya pada belanja langsung SKPD.
3. Meningkatkan kapasitas SDM bidang perkebunan baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Diharapkan dokumen Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang

melibatkan seluruh *Stakeholder*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.